



Article Informations
Corresponding Email:
nrisaalifia@gmail.com

Received: 10/02/2025; *Accepted:*
19/02/2025; *Published:* 30/06/2025

STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN EUROPEAN UNION DEFORESTATION REGULATION (EUDR) OLEH UNI EROPA TERHADAP EKSPOR KOPI INDONESIA

Alifia Nurisa¹⁾, Taufik Hidayat²⁾, Jusmalia Oktaviani³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Strategi Indonesia dalam menyikapi kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang diberlakukan Uni Eropa terhadap ekspor kopi. EUDR mewajibkan negara penghasil komoditas untuk memastikan bahwa produk yang diekspor tidak berasal dari lahan yang gundul setelah tanggal batas waktu yang ditetapkan. Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat mengingat kopi merupakan salah satu komoditas utama penyumbang devisa negara. Kajian ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi persyaratan EUDR, Indonesia harus mengembangkan sistem sertifikasi dan ketertelusuran yang efektif serta memperkuat kerja sama dengan lembaga internasional. Dalam hal ini, pentingnya perundingan dengan Uni Eropa untuk memastikan bahwa kepentingan petani kopi lokal tetap terjaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pendekatan diplomasi ekonomi, Indonesia dapat meningkatkan daya saing produk kopinya di pasar global dengan menunjukkan komitmen terhadap praktik pertanian berkelanjutan.

Kata Kunci: Diplomasi Ekonomi, EUDR, Ekspor Kopi

Abstract

Indonesia's strategy in responding to the European Union Deforestation Regulation (EUDR) policy imposed by the European Union on coffee exports. The EUDR requires commodity-producing countries to ensure that exported products do not come from deforested land after the specified deadline. In this context, Indonesia faces quite a challenge considering that coffee is one of the main commodities contributing to the country's foreign exchange. This study shows that in order to meet the EUDR requirements, Indonesia must develop an effective certification and traceability system and strengthen cooperation with international institutions. In this case, the importance of negotiations with the European Union to ensure that the interests of local coffee farmers are maintained in accordance with applicable regulations. Through an economic diplomacy approach, Indonesia can increase the competitiveness of its coffee products in the global market by demonstrating a commitment to sustainable agricultural practices.

Keywords: *Economic Diplomacy, EUDR, Coffe Exports*

1.1 PENDAHULUAN

Perdagangan internasional memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara karena adanya pertukaran barang dan jasa antar negara menciptakan dinamika ekonomi global. Perdagangan internasional dapat membantu memenuhi suatu kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai antarnegara melalui kegiatan ekspor dan impor. Tentunya hal tersebut melibatkan eksportir dan importir dari berbagai negara. Ekspor sebagai salah satu aspek dari perdagangan internasional yang berpengaruh pada ekosistem ekonomi dan politik.¹ Dalam konteks ini, Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara agraris, khususnya pada komoditas pertanian seperti kopi. Sebagai salah satu penghasil kopi terbesar di dunia, Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pasar global, dengan sebagian besar produksinya diekspor ke berbagai negara. Kopi merupakan minuman yang

¹ Bril Lyan Haska Pasolonk et al., "Daya Saing Indonesia Dalam Ekspor Kopi Dunia," SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 2, no. 3 (2023): 624–32, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i3.599>.

populer di seluruh dunia, berasal dari tanaman yang melalui proses pengolahan seperti sangrai dan penghalusan menjadi bubuk.² Kualitas minuman kopi sangat bergantung pada kualitas biji dan cara pengolahannya. Tidak semua tanah dapat menjadi media tanam yang baik bagi tumbuhan kopi.

Di sisi lain, Uni Eropa pun telah membuat suatu kebijakan yang mengatur kegiatan ekspor-impor, yaitu kebijakan Eropa Union Deforestation Regulation (EUDR). Kebijakan Eropa Union Deforestation Regulation (EUDR) merupakan kaidah hukum untuk mengatasi perubahan iklim dan kelangkaan keanekaragaman hayati.³ Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang baru-baru ini diperkenalkan oleh Uni Eropa menimbulkan tantangan baru bagi ekspor kopi Indonesia. Kebijakan ini mensyaratkan bahwa semua produk yang diekspor ke Eropa harus terbukti tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah tanggal batas tertentu. Dalam hal ini, Uni Eropa sendiri telah melanggar aturan World Trade Organization (WTO) karena sifatnya yang sepihak dan diskriminatif serta menciptakan hambatan perdagangan.⁴ Beberapa pihak berpendapat aturan ini melanggar aturan World Trade Organization (WTO) karena bersifat sepihak dan diskriminatif serta menimbulkan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Salah satunya adalah Hambatan Non Tarif (Non-Tariff Barriers) yang merupakan suatu bentuk hambatan yang tidak berupa tarif, namun dapat menghambat impor dan ekspor barang. Non-tarif dapat berupa aturan, peraturan, atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara untuk mengatur impor dan ekspor barang.⁵

Kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) berdampak pada komoditas lain seperti kelapa sawit dan kayu. Pada komoditas kelapa sawit akan mengalami deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, dan

² Ahmad Wildan Saputra Ramadhana, Avinda Distaniar Aulia, and Toifur Ulum, "Keunggulan Komparatif Ekspor Kopi Di Indonesia," *Journal of Economics, Business, Accounting and Management* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.61476/095w2813>.

³ Lina Fatayati Syarifa et al., "STRATEGI MENGHADAPI REGULASI BEBAS DEFORESTASI UNI EROPA (EUDR) PADA KARET ALAM BERKELANJUTAN Strategies for Facing the European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR) on Sustainable Natural Rubber" 43, no. 1 (2024): 57–66.

⁴ Ibid.

⁵ Baldwin Wingnaraja, Kawai, *A World Trade Organization for the 21st Century: The Asian Perspective*. UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2014.

hak-hak petani. Kemudian pada komoditas kayu akan mengalami eksploitasi kayu yang ilegal hingga menyebabkan kerusakan hutan dan mengancam ekosistem. Sedangkan strategi dalam menghadapi dampak tersebut dapat meningkatkan sertifikasi berkelanjutan, memperkuat kerjasama dengan importer, memperkuat pengawasan untuk mencegah penebangan ilegal, dan masih banyak hal lainnya untuk mencegah dampak tersebut. Dalam menghadapi kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) tersebut, Indonesia telah melakukan diplomasi sebagai upaya negara untuk menyeimbangkan kepentingan lingkungan dengan kebutuhan ekonomi dan perdagangan.

Pembahasan ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi yang dapat ditempuh Indonesia dalam menghadapi kebijakan EUDR, serta bagaimana diplomasi ekonomi dapat digunakan sebagai pendekatan untuk meningkatkan daya saing produk kopi Indonesia di pasar internasional. Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, Indonesia mampu memperkuat posisinya sebagai eksportir kopi terkemuka sekaligus memenuhi komitmennya terhadap praktik pertanian berkelanjutan. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai topik perdagangan internasional, di antaranya peneliti terdahulu membahas mengenai kebijakan perdagangan internasional, dampak FLEGT VPA terhadap ekspor hutan di Tengah EU Green Deal, daya saing Indonesia dalam ekspor kopi dunia, keunggulan komparatif ekspor kopi di Indonesia, strategi menghadapi regulasi bebas deforestasi Uni Eropa (EUDR) pada karet alam berkelanjutan, dan menganalisis tingkat daya saing ekspor komoditas kopi Indonesia di pasar dunia.⁶

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya terdapat perbedaan fokus penelitian yang telah dikemukakan. Perbedaan tersebut merupakan bentuk state of the art yang terdapat dalam penelitian ini yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam penelitian (research gap). Untuk mengisi research gap,

⁶ Alfis Yuhendra, Sispa Pebrian, and Juli Adevia, "Analisis Daya Saing Ekspor Pala Indonesia Di Pasar Internasional: Evaluasi Ssr, Idr, Rca, Dan Isp," *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi* 2, no. 3 (2024): 18–25, <https://doi.org/10.59066/jmae.v2i3.594>.

penelitian tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi Indonesia dalam menghadapi kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) oleh Uni Eropa terhadap ekspor kopi Indonesia dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam pembahasan yang berjudul "Strategi Indonesia dalam Menyikapi Kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) oleh Uni Eropa terhadap Ekspor Kopi Indonesia", menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Dengan Rumusan Masalah “ Bagaimana Strategi Indonesia dalam Menghadapi Kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) oleh Uni Eropa terhadap Ekspor Kopi Indonesia?” Tujuan Penelitian : Tujuan yang ingin dicapai secara umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Indonesia dalam menghadapi kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) oleh Uni Eropa terhadap ekspor kopi Indonesia.

Tujuan Khusus :

Tujuan yang lebih spesifik mengenai penelitian ini, di antaranya:

1. Menggambarkan dampak dari kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) oleh Uni Eropa terhadap ekspor kopi Indonesia.
2. Menggambarkan strategi yang dilakukan eksportir Indonesia dalam menghadapi kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) oleh Uni Eropa terhadap ekspor kopi Indonesia.

Jenis Penelitian: Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena terkait kebijakan EUDR dan dampaknya terhadap ekspor kopi Indonesia. Melalui pendekatan ini, penulis dapat mengumpulkan data yang mendalam dan memberikan analisis yang komprehensif terhadap isu yang diteliti.

Alat Penelitian: Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi pustaka, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, eksportir kopi, dan pakar di bidang pertanian untuk mendapatkan berbagai perspektif tentang kebijakan EUDR.

Teknik Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dan pengumpulan informasi dari literatur yang relevan, seperti jurnal, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan. Penulis juga menganalisis data sekunder dari sumber yang dapat dipercaya untuk mendukung argumen dalam penelitian.

Teknik Analisis Data: Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengorganisasikan informasi yang diperoleh dari wawancara dan studi pustaka. Penulis mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data dan menyusun argumen berdasarkan temuan-temuan tersebut.

Rencana Uji Validitas Data: Untuk memastikan validitas data, penulis melakukan triangulasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan pemangku kepentingan. Hal ini membantu mengurangi bias dan meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

Kerangka teoretis adalah bagian penting karena sebagai alur pemikiran yang membantu dalam mendefinisikan masalah dan memperjelas tujuan penelitian. Pemikiran, konsep, dan proporsi para ahli didefinisikan dalam kerangka teoretis sehingga ide-ide dapat terus dikembangkan untuk memberikan penjelasan logis terhadap fenomena sosial. Kerangka teoretis penelitian ini didasarkan pada suatu konsep yang berasal dari para ahli di bidangnya. Konsep yang diteliti dalam penelitian ini antara lain teori Neoliberalisme, perdagangan internasional, dan Diplomasi Ekonomi. Penelitian ini didasarkan pada beberapa konsep teoritis yang relevan dengan diplomasi ekonomi dan perdagangan internasional. Konsep-konsep tersebut meliputi:

Teori Neoliberalisme merupakan salah satu teori hubungan internasional yang masih diterapkan hingga saat ini. Menurut Kegley, Neoliberalisme muncul dan memberikan kritik dan prinsip pada neorealisme mengenai anarki dan struktur sistem internasional dan bagaimana perdamaian dapat dicapai.⁷ Perdamaian tersebut dicapai dengan membangun kerjasama internasional yang melibatkan negara, organisasi atau aktor-aktor non negara, serta institusi internasional. Teori Neoliberalisme mempercayai

⁷ Vinsensio Dugis, Teori Hubungan Internasional ; Perspektif-Perspektif Klasik, 2018.

bahwa institusi merupakan mediator serta alat agar kerjasama antar negara tercapai. Dalam lingkungan internasional pasti sangat kompetitif, secara otomatis negara berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama yang dilakukannya dengan negara lainnya. Keberlangsungan menjalin kerjasama antar negara dalam mencapai kepentingan negara juga diperlukan pihak institusi, yang di mana institusi tersebut berperan sebagai pengaman kepentingan nasional tersebut untuk ditingkatkan ke lingkup internasional. Fenomena kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa dalam ekspor kopi berpedoman kepada keempat asumsi dasar Neoliberalisme tersebut. Dalam hal ini, hambatan dan masalah yang terjadi dari kerjasama Indonesia dan Uni Eropa adalah kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR), di mana kebijakan tersebut berpotensi menaikkan harga kopi Indonesia di pasar Uni Eropa karena Indonesia sendiri membutuhkan biaya sertifikasi. Kebijakan tersebut sebagai aturan hukum yang memastikan bahwa Uni Eropa tidak berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan secara global.

Perdagangan internasional: Menyoroti pentingnya akses pasar bagi produk ekspor Indonesia, khususnya kopi. Studi ini mengkaji bagaimana kebijakan EUDR dapat memengaruhi daya saing kopi Indonesia di pasar global. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi Indonesia terkait dengan kebijakan EUDR, serta untuk mengembangkan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keberlanjutan ekspor kopi ke pasar internasional. Menurut Baldwin perdagangan internasional adalah suatu proses tukar menukar barang atau jasa yang terjadi antara satu negara dengan negara lainnya.⁸ Perdagangan internasional terjadi karena terdapat perbedaan hasil produksi. Setiap negara memiliki kekayaan alam, teknologi, dan kebudayaan yang berbeda sehingga hasil Pada kegiatan perdagangan internasional terdapat beberapa faktor yang menghambat, salah satu hambatan non-tarif. Hambatan non-

⁸ Wingnaraja, Kawai, *A World Trade Organization for the 21st Century: The Asian Perspective*. UK: Edward Elgar Publishing Limited.

tarif adalah hambatan yang memengaruhi perdagangan internasional namun bukan dalam bentuk tarif atau biaya tarif.

Hambatan non-tarif dapat berupa standar mutu, peraturan lingkungan hidup, peraturan kesehatan, peraturan keamanan, peraturan fiskal, peraturan sosial, peraturan budaya, peraturan teknis, peraturan hukum, dan peraturan politik.⁹ Hambatan non-tarif terbagi menjadi hambatan langsung dan hambatan tidak langsung. Berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai hambatan tersebut.

1. Kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) menyebabkan penurunan penjualan komoditas perkebunan di Indonesia, salah satunya kopi.
2. Kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) menyebabkan terbatasnya akses yang diberikan Uni Eropa atas produk perkebunan, salah satunya kopi.
3. Kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) menyebabkan eksportir mengubah kuantitas yang diperdagangkan.
4. Kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) menyebabkan kenaikan harga yang diperdagangkan.

Diplomasi ekonomi: Menurut Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock pada buku "The New Economic Diplomacy, dijelaskan bahwa diplomasi ekonomi melibatkan penggunaan berbagai instrumen, hal ini mencakup bagaimana negara mengambil keputusan di dalam negeri, bagaimana mereka bernegosiasi secara internasional, dan bagaimana proses-proses ini berinteraksi, negosiasi perjanjian perdagangan regional, krisis keuangan, dan interaksi antara kekuatan domestik dan eksternal membentuk lanskap diplomasi ekonomi saat ini. Diplomasi ekonomi adalah cara suatu negara berinteraksi dengan negara lain dalam bidang ekonomi. Setiap negara memiliki tujuan ekonomi, seperti meningkatkan perdagangan, menarik investasi, atau melindungi industri dalam negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara tidak hanya mengandalkan kekuatannya ekonominya, tetapi juga menggunakan metode "diplomatik" seperti bernegosiasi, melobi, dan

⁹ Ibid.

membangun hubungan baik dengan negara lain.¹⁰ Bayne dan Woolcock memandang diplomasi ekonomi sebagai keseluruhan proses yang meliputi:

1. Pengambilan keputusan dalam negeri: Bagaimana suatu negara membuat keputusan kebijakan ekonomi di dalam negeri yang memengaruhi hubungan ekonominya dengan negara lain. Faktor-faktor seperti kepentingan nasional, tekanan politik dalam negeri, dan kondisi ekonomi internal memainkan peran penting di sini.
2. Negosiasi internasional: Bagaimana negara bernegosiasi dengan negara lain di forum-forum internasional untuk mencapai tujuan ekonomi mereka. Ini melibatkan strategi, taktik, dan keterampilan negosiasi.
3. Interaksi antara kedua proses: Bagaimana pengambilan keputusan domestik dan negosiasi internasional saling memengaruhi. Diplomasi ekonomi yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana kekuatan internal dan eksternal berinteraksi.

Berdasarkan definisi diplomasi ekonomi dari Bayne dan Woolcock, diplomasi ekonomi harus mencakup upaya terpadu yang melibatkan keputusan internal yang bijaksana, negosiasi yang efektif dengan Uni Eropa, dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kedua proses ini saling memengaruhi. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi Indonesia sambil tetap mematuhi standar keberlanjutan global. Hal yang diperlukan dalam diplomasi ekonomi merupakan tentang bagaimana mengintegrasikan kepentingan domestik dan internasional, menggunakan berbagai alat diplomasi (negosiasi, lobi, promosi) untuk mencapai tujuan ekonomi, bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang maksimal, dan bekerja sama dengan negara lainnya untuk meraih hasil maksimal.

1.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal usul Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) dapat ditelusuri kembali ke serangkaian langkah dan kebijakan yang telah diambil Uni Eropa untuk mengatasi masalah global yang berhubungan dengan deforestasi. Secara resmi diadakan pada 19 April 2023, EUDR bertujuan untuk menghentikan

¹⁰ Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, *The New Economic Diplomacy Decision Making*, 2007.

perdagangan produk yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari inisiatif yang lebih besar,

Kesepakatan Hijau Eropa, yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca.¹¹

Proses pembentukan EUDR dimulai dengan diperkenalkannya arahan tersebut pada tahun 2019, ketika Komisi Eropa mulai mencari cara untuk mengurangi dampak konsumsi UE terhadap deforestasi global. Dalam konsultasi publik berikutnya, ada tekanan dari masyarakat sipil, organisasi lingkungan, dan Negara Anggota untuk mengambil langkah-langkah yang lebih ketat terhadap produk yang berkontribusi terhadap deforestasi. Hasil dari proses ini adalah penetapan tanggal batas waktu 31 Desember 2020, yang berarti bahwa produk yang dibuat dari lahan yang mengalami deforestasi setelah tanggal tersebut tidak akan dapat lagi memasuki pasar UE.¹²

Salah satu alasan utama penerapan EUDR adalah komitmen Uni Eropa untuk melindungi keanekaragaman hayati dan mendorong praktik perdagangan yang lebih berkelanjutan. Dengan adanya peraturan ini, Uni Eropa berharap dapat mendorong pelaku ekonomi untuk lebih transparan dalam rantai pasoknya dan lebih bertanggung jawab dalam proses produksi. EUDR juga mencerminkan upaya Uni Eropa untuk mencapai tujuan lingkungan hidup yang ditetapkan dalam berbagai perjanjian internasional, termasuk Perjanjian Iklim Paris.

Tidak mudah bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan suatu negara, terlebih Uni Eropa merupakan sebuah pasar tunggal terbesar di dunia dan memiliki aturan juga persyaratan yang rumit. Bukan hanya aturan dan syarat yang harus dilakukan oleh Indonesia agar bisa masuk ke pasar UE, persaingan yang ketat juga menjadi hambatan terbesar saat itu, dimana UE sendiri menetapkan standar tinggi bagi produk-produk yang akan masuk,

¹¹ Dr. Ir. Tungkot Sipayung, "EUROPEAN DEFORESTATION FREE REGULATION : KEBIJAKAN ANTI DEFORESTASI YANG MAKIN BOROS DEFORESTASI DAN EMISI (2023)," 2024,.

¹² Subashini Nadras et al., "THE EUROPEAN UNION DEFORESTATION-FREE REGULATION (EUDR): ASSESSING IMPACTS AND STRATEGIES FOR MALAYSIAN AND THE GLOBAL OIL PALM INDUSTRY," *Journal of Sustainability Science and Management* 19 (June 15, 2024): 54–74, <https://doi.org/10.46754/jssm.2024.06.005>.

hal ini membuat Indonesia kalah saing dengan negara lain.¹³ Dalam perkembangannya, Indonesia bukan hanya sekedar ekspor kopi dengan mudahnya, akan tetapi terdapat suatu proses yang cukup rumit untuk mencapai keinginan. Dengan mengembangkan standarisasi kualitas, Indonesia melakukan seleksi ketat terhadap biji kopi yang akan dikirim ke Eropa, itu dilakukan untuk memastikan bahwa hanya kopi yang berkualitas tinggi yang akan diterima oleh pasar Eropa. Pemasaran dan promosi juga dibutuhkan dalam pengembangannya.

Indonesia menjadi produsen kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Vietnam pada tahun 2012-2013, dengan produksi sekitar 748 ribu ton pada tahun 2012, atau 6,6% dari produksi kopi dunia. Ekspor kopi Indonesia menunjukkan tren peningkatan sejak awal berdirinya. Dengan hadirnya globalisasi, budaya kopi telah menyebar ke seluruh dunia, dan konsumsi kopi dunia telah meningkat secara signifikan dalam dekade terakhir. Di banyak negara berkembang, produksi kopi merupakan sumber pendapatan penting bagi petani dan memainkan peran penting dalam pembangunan sosial ekonomi. Indonesia memiliki potensi besar di pasar internasional karena kopi yang dihasilkannya memiliki karakteristik unik yang memungkinkannya bersaing secara global. Salah satu contohnya adalah Kopi Luwak. Kopi ini dikenal sebagai kopi termahal di dunia dengan harga \$325 per kilogram, menurut majalah Forbes. Konsumsi kopi dunia terus meningkat setiap tahun, seperti yang ditunjukkan oleh rata-rata impor kopi dunia.

Neoliberalisme sangat menekankan pentingnya pasar bebas dan minimnya intervensi pemerintah dalam perdagangan, dalam konteks hubungan Indonesia dan Uni Eropa, hal ini terlihat melalui upaya untuk mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan akses pasar bagi produk-produk Indonesia, termasuk kopi. Namun, liberalisme ini sering kali diimbangi oleh regulasi ketat dari Uni Eropa yang dapat menghambat ekspor kopi Indonesia,

¹³ Laporan yang dibuat oleh Montague Lord, sebagai sebuah lembaga International Economic Development dan Rina Oktaviani & Edzard Ruehe sebagai Expert mengenai hubungan Uni Eropa dan Indonesia (2010)

seperti kebijakan EUDR yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dan mencegah deforestasi. Kebijakan seperti EUDR menunjukkan bagaimana negara-negara besar menggunakan regulasi untuk melindungi industri domestik mereka. Ini menciptakan ketegangan dalam hubungan perdagangan, dimana Indonesia harus menavigasi kepentingan

nasionalnya sambil memenuhi tuntutan Internasional atau global. Kebijakan EUDR dapat berdampak pada ekspor kopi Indonesia, karena produk yang masuk ke pasar UE harus memenuhi standar lingkungan tertentu. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi petani kopi Indonesia yang tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan untuk memenuhi standar tersebut. Fokus neoliberalisme pada pasar bebas sering kali mengabaikan realitas sosial dan ekonomi negara-negara berkembang, yang dapat memperparah ketimpangan perdagangan.

Pada kegiatan perdagangan Internasional terdapat beberapa faktor yang menghambat, salah satunya adalah hambatan non-tarif. Hambatan non-tarif merupakan hambatan yang mempengaruhi perdagangan internasional. EUDR termasuk kedalam hambatan non-tarif, karena jika dikaitkan dengan aspek ini, EUDR termasuk kedalam peraturan lingkungan. Hambatan non-tarif terbagi menjadi dua yaitu Hambatan Langsung

1. Hambatan langsung merupakan hambatan yang menghambat perdagangan Internasional secara langsung seperti peraturan impor maupun ekspor. EUDR merupakan kebijakan yang secara tidak langsung menghambat kegiatan ekspor dan impor, karena EUDR sendiri mengeluarkan peraturan berupa syarat yang harus dipenuhi oleh peng-ekspor yang harus memenuhi standar untuk dapat mengeskpor produknya ke Uni Eropa. EUDR menetapkan persyaratan ketat ini untuk produk yang diekspor ke Uni Eropa, termasuk kopi, guna memastikan produk tersebut tidak terkait dengan deforestasi. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi eksportir Indonesia yang harus memenuhi standar tersebut untuk memasuki pasar Eropa. Sebagai hambatan langsung, EUDR menetapkan persyaratan dokumentasi dan keterlacakan yang harus dipenuhi oleh eksportir. Ini berarti bahwa setiap pengiriman kopi

harus disertai dengan bukti bahwa kopi tersebut tidak berasal dari daerah yang telah mengalami penggundulan hutan. Proses ini dapat menambah biaya dan kompleksitas bagi eksportir, terutama petani kecil yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi persyaratan ini.

2. Hambatan Tidak Langsung

Hambatan ini berupa peraturan lingkungan hidup yang secara tidak langsung menghambat perdagangan Internasional, EUDR merupakan peraturan lingkungan yang bertujuan untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan terkait dengan komoditas yang akan masuk ke pasar Uni Eropa, EUDR bertujuan untuk mencegah produk- produk yang menyebabkan penggundulan hutan, seperti kopi, minyak kelapa sawit, dan kayu, memasuki pasar Uni Eropa. Peraturan EUDR bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi keanekaragaman hayati global dengan memastikan bahwa produk yang dijual tidak berasal dari lahan yang mengalami penggundulan hutan.

Berdasarkan buku “The New Economic Diplomacy” milik Bayne dan Woolcock, diplomasi ekonomi didefinisikan sebagai cara negara-negara di abad ke-21 mengelola hubungan ekonomi eksternal mereka, bagaimana mereka membuat keputusan di dalam negeri, bagaimana mereka bernegosiasi secara internasional, dan bagaimana proses-proses ini berinteraksi. (Definisi ini tersirat dalam Bab 1 dan 2. Mengenai strategi Indonesia dalam menghadapi EUDR untuk ekspor kopi:

Keputusan dalam negeri:

Indonesia perlu membuat keputusan internal tentang keberlanjutan produksi kopi, seperti menerapkan standar sertifikasi yang tepat, melibatkan petani dalam rantai pasokan berkelanjutan, dan meningkatkan pengelolaan lahan. Keputusan ini mempengaruhi posisi Indonesia dalam negosiasi internasional

Sistem Pelacakan (Traceability)

Dalam hal ini dimaksudkan ialah untuk menerapkan sistem pelacakan yang akan memastikan bahwa produk ekspor memenuhi standar

keberlanjutan dan tidak berkontribusi pada deforestasi. Dalam konteks diplomasi ekonomi, Berridge mengatakan sistem pelacakan atau Traceability adalah kemampuan untuk melacak asal dan jalur suatu produk dari titik produksi hingga konsumen akhir. Untuk menerapkan sistem pelacakan yang efektif, eksportir harus mengembangkan metodologi dokumentasi yang komprehensif. Ini termasuk menggunakan teknologi informasi untuk mencatat setiap langkah dalam rantai pasokan, mulai dari menanam biji kopi hingga mengirimkannya ke konsumen. Dengan cara ini, setiap produk dapat dilacak kembali ke sumbernya dengan transparansi penuh. Untuk mendukung penerapan EUDR, Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan platform ketertelusuran guna memastikan bahwa setiap produk kopi dapat dilacak dari sumbernya hingga ke konsumen akhir

Penyusunan Platform Sertifikasi

Indonesia harus menyusun platform sertifikasi yang dapat menjamin bahwa produk kopi yang diekspor tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi. Perkebunan kopi Indonesia kini diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). STDB merupakan dokumen yang menjamin legalitas kegiatan budidaya kopi, memastikan kegiatan tersebut tidak terkait dengan penebangan hutan, serta mencantumkan koordinat dan poligon lokasi perkebunan. Semua ekspor kopi harus disertai dengan Surat Keterangan Asal (SKA) yang memverifikasi bahwa kopi tersebut berasal dari lahan yang tidak terlibat dalam penggundulan hutan.¹⁴

Penerapan Skema Evidence-Base Evaluation

Pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao yang telah mengusulkan sistem penilaian berbasis bukti untuk membuktikan bahwa pertanian kopi tidak berkontribusi terhadap deforestasi, yang akan melibatkan audit di tempat dan verifikasi sistematis terhadap praktik penanaman kopi berkelanjutan. Skema Evidence-Base Evaluation merupakan pendekatan wajib untuk menilai praktik

¹⁴ "Peraturan Menteri Perdagangan RI," n.d., <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/stream/1522/2>.

keberlanjutan yang terkait dengan produksi komoditas, termasuk kopi.¹⁵ Pembentukan Joint Task Force.

Joint Task Force (JTF) merupakan mekanisme kolaboratif yang dibentuk oleh beberapa negara atau organisasi untuk bersama-sama mengatasi isu-isu tertentu. Berdasarkan kebijakan EUDR (EU Deforestation Regulation), Indonesia telah membentuk JTF untuk mengatasi tantangan ekspor kopi dan komoditas lainnya ke Uni Eropa. Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh EUDR, Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa telah membentuk Joint Task Force terhadap EUDR. JTF dibentuk setelah Indonesia dan Malaysia melaksanakan misi bersama ke Brussels pada 30-31 Mei 2023, yang kemudian diikuti oleh kunjungan tindak lanjut Komisi Eropa ke kedua negara pada 26-28 Juni 2023.¹⁶

Negosiasi internasional

Indonesia perlu bernegosiasi dengan Uni Eropa untuk memastikan bahwa penerapan EUDR tidak merugikan petani kopi kecil. Negosiasi ini dapat mencakup permintaan masa transisi, bantuan teknis, atau pengakuan standar Indonesia. Perlu adanya negosiasi untuk membangun suatu perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra untuk mengurangi atau menanggulangi hambatan tarif maupun non-tarif. Dalam konteks diplomasi ekonomi, negosiasi merupakan alat penting untuk membangun hubungan antarnegara dan mencapai kesepakatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional. Berridge mengemukakan bahwa melalui negosiasi, negara-negara dapat mengatasi tantangan global seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, dan isu lingkungan lainnya yang memengaruhi perdagangan internasional. Pemerintah Indonesia melalui kementerian perdagangan melakukan langkah awal berupa diskusi dengan wakil Kanselir sekaligus Menteri Perekonomian dan Aksi Iklim Republik Federal Jerman dalam membahas akan implementasi EUDR yang akan merugikan komoditas

¹⁵ Dadan M. Ramdan, "Jalan Panjang Perjuangan Diplomasi RI Melawan UU Anti Deforestasi Uni Eropa," Nasional.Kontan, 2024, <https://nasional.kontan.co.id/news/jalan-panjang-perjuangan-diplomasi-ri-melawan-uu-anti-deforestasi-uni-eropa>.

¹⁶ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Indonesia, Malaysia, Dan Uni Eropa Bentuk Gugus Tugas Untuk Mengatasi Berbagai Hal Terkait European Union Deforestation Regulation" (Jakarta, 2023), <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5294/indonesia-malaysia-dan-uni-eropa-bentuk-gugus-tugas-untuk-mengatasi-berbagai-hal-terkait-european-union-deforestation-regulation>.

di Indonesia termasuk kopi, langkah awal dari Indonesia tersebut mendapat dukungan dari berbagai negara yang sama-sama terkena dampak atas kebijakan EUDR ini, sebanyak 20 dari 27 negara menyuarakan penundaan EUDR termasuk Jerman dan Amerika Serikat.¹⁷

Interaksi domestik-internasional

Keberhasilan negosiasi internasional bergantung pada kredibilitas Indonesia dalam menerapkan praktik berkelanjutan di dalam negeri. Jika Indonesia tidak menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan, posisi negosiasinya akan melemah. Pemerintah Indonesia harus menyeimbangkan kepentingan ekonomi petani dan eksportir kopi (yang mungkin merasa terbebani oleh persyaratan EUDR) dengan tekanan internasional untuk mematuhi standar keberlanjutan. Keputusan pemerintah untuk menetapkan standar keberlanjutan nasional dan mendukung petani akan memengaruhi kredibilitas Indonesia dalam negosiasi dengan UE.

1.3 KESIMPULAN

Kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang diberlakukan oleh Uni Eropa mengharuskan produk yang diimpor tidak berasal dari lahan hasil deforestasi setelah tanggal tertentu. Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia karena kopi merupakan salah satu komoditas ekspor utama. Untuk memenuhi persyaratan EUDR, Indonesia perlu memiliki sistem sertifikasi dan ketertelusuran yang efektif untuk memastikan bahwa kopi yang diekspor memenuhi standar keberlanjutan. Indonesia perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga internasional dan melakukan perundingan dengan Uni Eropa untuk memastikan kepentingan petani kopi lokal terlindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pendekatan diplomasi ekonomi, Indonesia dapat meningkatkan daya saing produk kopinya di pasar global dengan menunjukkan komitmen terhadap praktik pertanian berkelanjutan.

¹⁷ Antara News, "Kemendag: Indonesia Perjuangkan Masalah EUDR Pada Perundingan IEU CEPA," 5 Maret, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3995577/kemendag-indonesia-perjuangkan-masalah-eudr-pada-perundingan-ieu-cepa>.

DAFTAR PUSTAKA

Antara News. "Kemendag: Indonesia Perjuangkan Masalah EUDR Pada Perundingan IEU CEPA." 5 Maret, 2024.

<https://www.antaraneews.com/berita/3995577/kemendag-indonesia-perjuangkan-masalah-eudr-pada-perundingan-ieu-cepa>.

Bayne, Nicholas, and Stephen Woolcock. *The New Economic Diplomacy Decision Making*, 2007.

Dadan M. Ramdan. "Jalan Panjang Perjuangan Diplomasi RI Melawan UU Anti Deforestasi Uni Eropa." Nasional.Kontan, 2024.

<https://nasional.kontan.co.id/news/jalan-panjang-perjuangan-diplomasi-ri-melawan-uu-anti-deforestasi-uni-eropa>.

Dr. Ir. Tungkot Sipayung. "EUROPEAN DEFORESTATION FREE REGULATION : KEBIJAKAN ANTI DEFORESTASI YANG MAKIN BOROS DEFORESTASI DAN EMISI (2023)," 2024. Uni Eropa atau European Union (EU) telah mengeluarkan dan memberlakukan kebijakan baru perdagangan yakni kebijakan anti-deforestasi yang dikenal dengan European Union Deforestation-Free Regulation atau kebijakan EUDR (PASPI Monitor, 2022d). Kebijakan ters.

Dugis, Vinsensio. *Teori Hubungan Internasional ; Perspektif-Perspektif Klasik*, 2018.

Fatayati Syarifa, Lina, Andrea Akbar, Radite Tistama, Suroso Rahutomo, dan Aprizal Alamsyah Pusat Penelitian Karet, Jl Palembang-Pangkalan Balai

Km, and Sumatera Selatan. "STRATEGI MENGHADAPI REGULASI BEBAS DEFORESTASI UNI EROPA (EUDR) PADA KARET ALAM BERKELANJUTAN

Strategies for Facing the European Union Deforestation-Free Regulation

(EUDR) on Sustainable Natural Rubber" 43, no. 1 (2024): 57–66. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

"Indonesia, Malaysia, Dan Uni Eropa Bentuk Gugus Tugas Untuk Mengatasi Berbagai Hal Terkait European Union Deforestation Regulation."

Jakarta, 2023. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5294/indonesia-malaysia-dan-uni-eropa-bentuk-gugus-tugas-untuk-mengatasi-berbagai-hal-terkait-european-union-deforestation-regulation>.

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5294/indonesia-malaysia-dan-uni-eropa-bentuk-gugus-tugas-untuk-mengatasi-berbagai-hal-terkait-european-union-deforestation-regulation>.

Nadras, Subashini, Rafizah Mazlan, Hisham Hussain, and Insyirah Shah. "THE EUROPEAN UNION DEFORESTATION-FREE REGULATION (EUDR): ASSESSING IMPACTS AND STRATEGIES FOR MALAYSIAN AND THE GLOBAL OIL PALM INDUSTRY." *Journal of Sustainability Science and Management* 19 (June 15, 2024): 54–74.

<https://doi.org/10.46754/jssm.2024.06.005>.

Pasolonk, Bril Lyan Haska, Jian Maulia Juniar, Mutiara Maharani, Rexabel Rizq Raviqois, and Rifdah Putri Adelia. "Daya Saing Indonesia Dalam Ekspor Kopi Dunia." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 3 (2023): 624–32.

<https://doi.org/10.55681/sentri.v2i3.599>.

"Peraturan Menteri Perdagangan RI," n.d.

<https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/stream/1522/2>.

Ramadhana, Ahmad Wildan Saputra, Avinda Distaniar Aulia, and Toifur Ulum. "Keunggulan Komparatif Ekspor Kopi Di Indonesia." *Journal of Economics, Business, Accounting and Management* 2, no. 1 (2024).

<https://doi.org/10.61476/095w2813>.

Wingnaraja, Kawai, Baldwin. *A World Trade Organization for the 21st Century: The Asian Perspective*. UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2014.

Yuhendra, Alfis, Sispa Pebrian, and Juli Adevia. "Analisis Daya Saing Ekspor Pala Indonesia Di Pasar Internasional: Evaluasi Ssr, Idr, Rca, Dan Isp." *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi* 2, no. 3 (2024): 18–25.

<https://doi.org/10.59066/jmae.v2i3.594>.